

Judul : Selat Hormuz berbahaya, komisi I serukan lagi jaga keamanan WNI
Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Selat Hormuz Berbahaya Komisi I Serukan Lagi Jaga Keamanan WNI

FOTO: DPR GO ID



Mercy Chriesty Barends

ANGGOTA Komisi III DPR Mercy Chriesty Barends mengutuk keras insiden ledakan dan tenggelamnya kapal tugboat Musaffah 2 di Selat Hormuz. Peristiwa itu mengakibatkan tiga WNI masih dinyatakan hilang dan hingga kini masih dalam proses pencarian otoritas setempat.

Mercy menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden itu. Serangan terhadap kapal sipil di jalur pelayaran internasional tidak bisa dibenarkan. Karena itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan serta berbagai ketentuan dalam hukum laut internasional yang berlaku saat ini.

Menurutnya, insiden itu tidak bisa dilepaskan dari eskalasi konflik militer antara Iran dengan AS dan Israel yang semakin memanas. "Situasi itu meningkatkan risiko keamanan di kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, mengancam keselamatan pekerja sipil di laut," ujarnya, kemarin.

Para pelaut, kata Mercy, adalah pekerja sipil yang dilindungi hukum internasional. Keselamatan mereka adalah bagian dari perlindungan HAM. Karena itu, tidak boleh ada pihak mana pun yang menjadikan jalur pelayaran internasional sebagai arena konflik yang mengorbankan

pekerja maritim.

Mercy mendesak pihak-pihak yang terlibat konflik di kawasan itu untuk segera menghentikan segala bentuk serangan di Selat Hormuz. Hal itu dilakukan demi memastikan keamanan jalur pelayaran internasional agar tetap bisa dilalui dengan tenang oleh berbagai kapal niaga.

Saat ini, sambungnya, Selat Hormuz melayani sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, merupakan jalur laut internasional yang sangat strategis. "Harus dijaga sebagai wilayah aman bagi aktivitas perdagangan global maupun keselamatan para pelaut yang bekerja di jalur tersebut," katanya.

Jaminan keselamatan di Selat Hormuz tidak hanya menyangkut kepentingan satu negara, tetapi merupakan tanggung jawab komunitas internasional. Upaya perlindungan di wilayah itu bukan hanya untuk WNI, tapi untuk setiap pelaut dan pekerja maritim dari seluruh dunia yang bekerja di jalur perdagangan.

Mercy mendesak Pemerintah terus melakukan koordinasi diplomatik dengan otoritas setempat guna memastikan proses pencarian tiga WNI yang hilang dilakukan secara maksimal. "Pemerintah harus memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja migran Indonesia di sektor maritim, terutama yang bekerja di kawasan konflik," tegasnya.

Senada, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menegaskan, Pemerintah harus menyusun skenario kontinjensi yang komprehensif untuk keselamatan WNI. Yakni, pemetaan wilayah dengan risiko tinggi, identifikasi kelompok WNI yang rentan, serta mempersiapkan jalur evakuasi melalui udara, laut, dan darat jika kondisi makin tidak stabil. ■ PYB